



Financial Accounting and corporate Reporting

Government Financial Statement

Prof Dr BANDI, SE., M.Si., Ak. CA., CTA., CPA

Syllabus (RPS)

- Second Part

No	Tujuan <u>Pembelajaran</u>	Materi	<u>Sumber</u>	Sub <u>Sumber</u> Indonesia	Sub <u>Sumber</u> Int'l
14	Mampu memiliki penguasaan analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah	Bahan kajian analisis laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat	SAP	PP 71/2010	GASB

Standards

- Accounting for Government Financial Statement

No	Standar Indonesia	Standar US/ Internasional
1	PP 71/2010 SAP	SFAS GASB
2		IAS ; IFRS

Pendahuluan

- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
 - sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
- SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),
 - dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan
 - disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Pendahuluan

- Sampai dengan tahun **2003**, SAP menggunakan cash basis,
- dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan *cash toward accrual basis* (basis kas menuju akrual).
 - SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis **kas**, serta
 - mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis **akrual**.
- Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis **akrual** (*accrual basis*)

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- [Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010](#)
- [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2016](#)
- [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2019](#)
- [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2020](#)
- [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2021](#)
- [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2022](#)
- [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2025](#)
- [Government Accounting Standards Republic of Indonesia \(handbook 2019\)](#)
- [Government Accounting Standards Republic of Indonesia \(handbook 2020\)](#)

Pendahuluan

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

- Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kerangka konseptual pelaporan keuangan adalah **panduan konseptual**
 - yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk *stakeholder* eksternal.
 - dibentuk dan diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB)
 - yang kemudian dilanjutkan dengan adaptasi dari masing-masing negara, seperti Indonesia.
- Tujuan kerangka konseptual pelaporan keuangan adalah memberikan **solusi** terhadap masalah yang muncul pada penyusunan laporan secara konsisten.
 - untuk memberikan gambaran mengenai batasan-batasan dalam akuntansi, karakteristik informasi, serta prinsip yang terdapat pada pelaporan keuangan.

Pendahuluan

- Kerangka konseptual pelaporan keuangan (juga pelaporan keuangan pemerintah) terbentuk sebagai **acuan dasar** dalam pembuatan standar keuangan pada lingkungan bisnis yang terus berubah.
 - agar dapat membuat dan menetapkan perkembangan standar akuntansi yang lebih akurat dan konsisten.
 - juga membantu orang-orang untuk lebih memahami dasar dari pelaporan keuangan yang lebih dalam.

Pendahuluan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

- adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi merupakan Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ([PP NO. 24 TAHUN 2005](#), lihat Kamus hukum, 2025)
- Menurut [PP NO. 71 TAHUN 2010](#), Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. (lihat Kamushukum, 2025)

Pendahuluan

Entitas Pelaporan

- adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:
 - (a) Pemerintah pusat;
 - (b) Pemerintah daerah;
 - (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*
2. Asset diukur menggunakan *historical cost*
3. Depresiasi untuk asset tetap
4. *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
5. *Cash basis* pada Laporan Realisasi Anggaran
6. *Full disclosure*

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (cont'd)

Referensi utama untuk SAP berbasis akrual ini adalah *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

- Terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP untuk SAP berbasis akrual ini, yaitu:
 1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
 2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
 4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
 5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
 6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
 7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

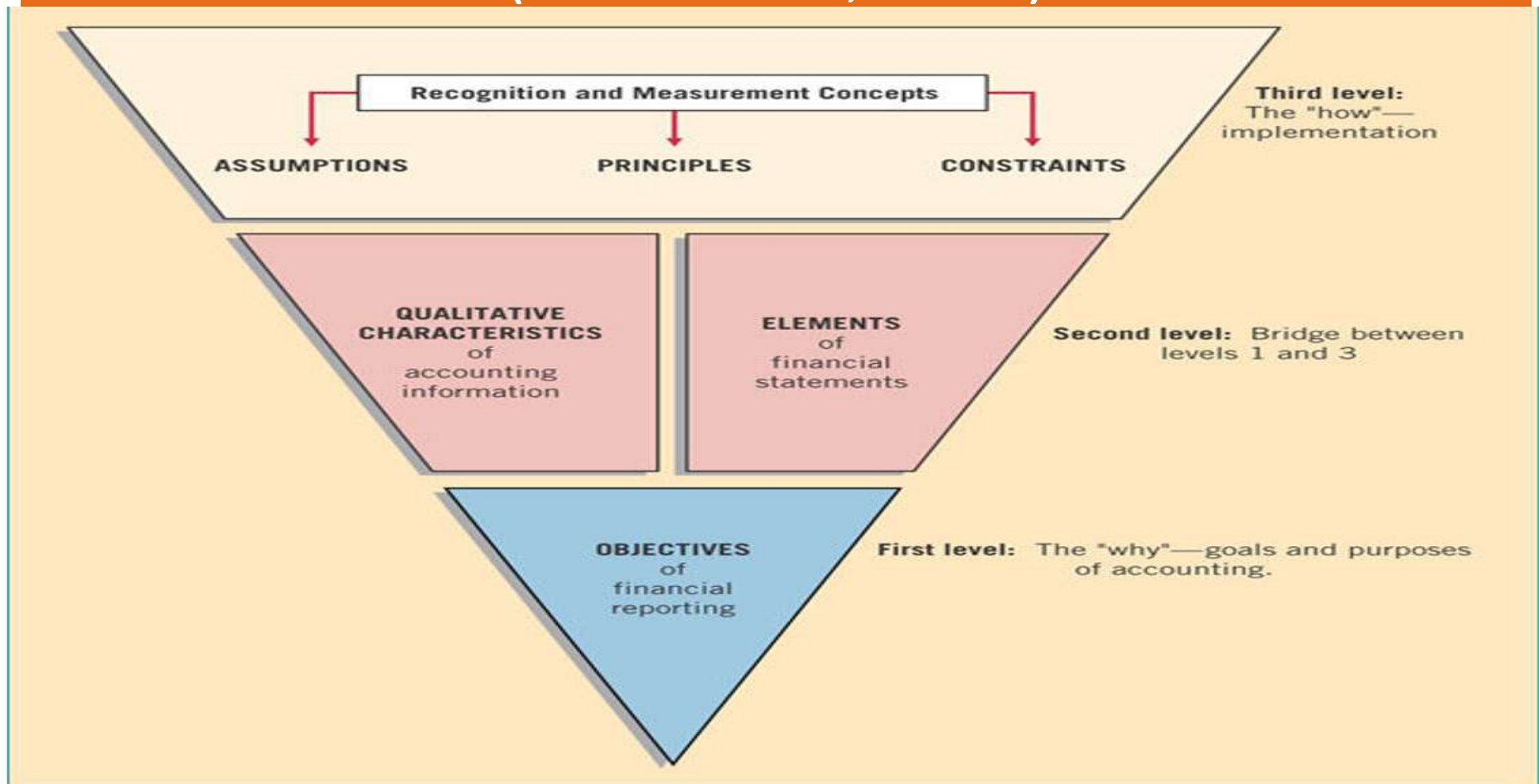
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (cont'd)

- Terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP untuk SAP berbasis akrual ini, yaitu:
 8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
 9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
 10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
 11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
 12. PSAP 12 Laporan Operasional
 13. PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (cont'd)

- Laporan Keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan dengan SAP **berbasis kas menuju akrual** yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Laporan Keuangan dengan SAP berbasis akrual, laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu:
 1. Neraca
 2. Laporan Realisasi Anggaran
 3. Laporan Operasional
 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 5. Laporan Perubahan Ekuitas
 6. Laporan Arus Kas
 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kieso et al., FASB)



Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

- adalah kerangka dasar yang mendasari **penyusunan** dan **pengembangan** Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- berfungsi sebagai pedoman bagi berbagai pihak, termasuk penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan, dalam mengatasi masalah akuntansi yang **belum diatur** dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan).

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (cont'd)

Penyusunan dan Pengembangan SAP:

- Kerangka konseptual menyediakan **fondasi** bagi penyusunan dan pengembangan SAP,
 - yang merupakan standar akuntansi yang diterapkan dalam pemerintahan.

Pedoman untuk Pemecahan Masalah:

- Ketika menghadapi masalah akuntansi yang **belum** diatur dalam PSAP, kerangka konseptual ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menemukan solusi.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (cont'd)

Penyusun, Pemeriksa, dan Pengguna Laporan Keuangan:

- Kerangka konseptual bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam akuntansi pemerintahan,
 - termasuk penyusun laporan keuangan, auditor, dan pengguna laporan keuangan (seperti masyarakat umum dan pemerintah).

Bagian Tak Terpisahkan dari SAP:

- Kerangka konseptual merupakan **bagian tak terpisahkan** dari SAP,
- yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (cont'd)

Penyusunan Laporan Keuangan:

- Kerangka konseptual memberikan **konsep dasar** untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan Laporan Keuangan:

- Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (cont'd)

Tujuan & Fungsi

1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari **penyusunan** dan **penyajian** laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai **acuan** bagi:
 - (a) penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya;
 - (b) penyusun laporan keuangan dalam **menanggulangi** masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
 - (c) pemeriksa dalam memberikan **pendapat** mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
 - (d) para pengguna laporan keuangan dalam **menafsirkan** informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (cont'd)

Tujuan & Fungsi

2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai **acuan** dalam hal terdapat masalah akuntansi yang **belum** dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi **diunggulkan** relatif terhadap kerangka konseptual ini.
 - Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (cont'd)

Ruang Lingkup

- Kerangka konseptual ini membahas:
 - (a) tujuan kerangka konseptual;
 - (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
 - (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - (d) entitas pelaporan;
 - (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
 - (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
 - (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.
- Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

- Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
- Laporan keuangan terutama digunakan untuk
 - membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,
 - menilai kondisi keuangan,
 - mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan
 - membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan

- untuk kepentingan:
 - (a) Akuntabilitas
 - (b) Manajemen
 - (c) Transparansi
 - (d) Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Kepentingan penyusunan laporan keuangan

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Kepentingan penyusunan laporan keuangan

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan.
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Tujuan Pelaporan Keuangan

- Untuk memenuhi tujuan-tujuan pelaporan keuangannya, laporan keuangan pemerintah menyediakan informasi mengenai:
 - pendapatan,
 - belanja,
 - transfer,
 - dana cadangan,
 - pembiayaan,
 - aset,
 - kewajiban,
 - ekuitas dana, dan
 - arus kas suatu entitas pelaporan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Komponen Laporan Keuangan

- Laporan keuangan pokok terdiri dari:
 - (a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - (b) Neraca;
 - (c) Laporan Arus Kas;
 - (d) Catatan atas Laporan Keuangan.
- Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 25 (Kerangka konseptual Akuntansi pemerintahan), entitas pelaporan diperkenankan menyajikan:
 - Laporan Kinerja Keuangan dan
 - Laporan Perubahan Ekuitas.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemerintah

- Pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
 - (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
 - (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
 - (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
 - (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Asumsi Dasar

- Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - (a) Asumsi kemandirian entitas;
 - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Asumsi Dasar - (a) Asumsi kemandirian entitas;

- Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
- Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
- Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Asumsi Dasar - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

- Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
- pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Asumsi Dasar - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

- Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
- diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan



Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan

- adalah **ukuran-ukuran normatif** yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:
 - (a) Relevan;
 - (b) Andal;
 - (c) Dapat dibandingkan; dan
 - (d) Dapat dipahami.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (a) Relevan

- apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
 - (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 - (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
 - (c) Tepat waktu
 - (d) Lengkap

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (a) Relevan

- Informasi yang relevan:

- (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*): Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*): Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (a) Relevan

- Informasi yang relevan:
 - (c) Tepat waktu: Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - (d) Lengkap: Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (b) Andal

- Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
- menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
- Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - (a) Penyajian Jujur
 - (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 - (c) Netralitas

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (b) Andal

- Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - (a) Penyajian Jujur : Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*): Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - (c) Netralitas: Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (c) Dapat dibandingkan

- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
 - secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
 - secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut **diungkapkan** pada periode terjadinya perubahan.

.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

(cont'd)

Karakteristik kualitatif - (d) Dapat dipahami

- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
 - pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud..

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh:

- pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi,
- penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta
- pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

- Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
 - (a) Basis akuntansi;
 - (b) Prinsip nilai historis;
 - (c) Prinsip realisasi;
 - (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - (e) Prinsip periodisitas;
 - (f) Prinsip konsistensi;
 - (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - (h) Prinsip penyajian wajar.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Basis Akuntansi

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
 - **basis kas** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
 - **basis akrual** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
- Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.
- Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba.
- Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Basis Akuntansi

- Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat **terjadinya** transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 (Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan) menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Nilai Historis (*Historical Cost*)

- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
 - Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Realisasi (*Realization*)

- Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
- Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

- Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar **transaksi** serta **peristiwa** lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek **formalitasnya**.
- Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus **diungkapkan** dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Periodisitas (*Periodicity*)

- Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- Periode utama yang digunakan adalah tahunan.
- Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Konsistensi (*Consistency*)

- Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
- Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
- Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

- Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

- Laporan keuangan menyajikan dengan wajar:
 - Laporan Realisasi Anggaran,
 - Neraca,
 - Laporan Arus Kas, dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
 - Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(cont'd)

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

- Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan

- adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang **ideal** dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
- Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:
 - (a) Materialitas;
 - (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
 - (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

(cont'd)

Materialitas

- Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.
- Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi Keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

(cont'd)

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

- Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.
 - laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.
 - Namun, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
- Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
- Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

(cont'd)

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

- Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.
- Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.
- Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah mencakup:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Laporan Realisasi Anggaran

- menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,
 - yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
 - Unsur yang dicakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan (basis kas)
 - (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - (c) Belanja (basis kas)
 - (d) Belanja (basis akrual)
 - (e) Transfer
 - (f) Pembiayaan (*financing*)
 - (g) Penerimaan pembiayaan.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Laporan Realisasi Anggaran – unsur-unsurnya:

- (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Laporan Realisasi Anggaran – unsur-unsurnya:

- (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca

- menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - (a) Aset
 - (b) Kewajiban
 - (c) Ekuitas Dana

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Aset

- Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
- Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.
 - aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Aset

- Aset lancar meliputi:
 - kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Aset nonlancar
 - Mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
 - diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Aset

- Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen.
 - Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.
 - Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Aset

- Aset tetap meliputi:
 - tanah,
 - peralatan dan mesin,
 - gedung dan bangunan,
 - jalan,
 - irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan
 - +---konstruksi dalam pengerjaan.
- Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai asset lainnya.
 - Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Kewajiban

- Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.
 - kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.
 - terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Kewajiban

- Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Neraca - Ekuitas Dana

- Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
 - (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
 - (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang- undangan.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Laporan Arus Kas

- Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- Unsur yang dicakup terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
 - (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
 - (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Catatan atas Laporan Keuangan

- meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam:
 - Laporan Realisasi Anggaran,
 - Neraca, dan
 - Laporan Arus Kas.
- juga mencakup
 - informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta
 - ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Catatan atas Laporan Keuangan

- mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
 - (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
 - (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

- Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.
 - disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.
- Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan Ekuitas,
 - yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi

- adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

- Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

- Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.
 - Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah.
 - Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Keandalan Pengukuran

- Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada **nilai uang** akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.
- Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
 - Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Pengakuan Aset

- Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan **diperoleh** oleh pemerintah dan **mempunyai** nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.
 - Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.
 - titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Pengakuan Pendapatan (**Par. 88**)

- Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Pengakuan Belanja (Par. 89)

- Belanja menurut **basis kas** diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran unsur Laporan keuangan (**Par. 90 & 91**)

- adalah proses **penetapan** nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
 - Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan (cont'd)

Pengukuran unsur Laporan keuangan (**Par. 90 & 91**)

- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
- Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Summary

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, **SFAS**), yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK/ FASB), menetapkan standar untuk akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia/ **Amerika Serikat**.
 - Standar-standar ini penting untuk analisis laporan keuangan, menyediakan kerangka kerja umum untuk memahami dan membandingkan informasi keuangan.
 - PSAK/ SFAS memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan secara konsisten, sehingga lebih andal dan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator

Summary

- USA - Standar Akuntansi Keuangan (FASB) dan Standar Akuntansi Pemerintah (GASB) sama-sama penting untuk pelaporan keuangan, tetapi keduanya berbeda dalam cakupan dan entitas yang diaturnya.
 - FASB menetapkan standar untuk perusahaan swasta dan organisasi nirlaba,
 - GASB menetapkan standar untuk pemerintah negara bagian dan lokal.
- Kedua badan tersebut bertujuan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas,
 - standar GASB secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan unik entitas pemerintah

Summary

- USA - Standar Akuntansi Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting Standards Board/GASB*)
 - untuk menyediakan kerangka kerja akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah negara bagian dan daerah.
 - Standar ini, yang dikenal sebagai Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum (GAAP),
 - dimaksudkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.
- Indonesia – Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Summary

- Sampai dengan tahun **2003**, SAP menggunakan cash basis, dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan *cash toward accrual basis* (basis kas menuju akrual).
- SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis **kas**, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis **akrual**.
- Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis **akrual** (*accrual basis*)

Summary

- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah kerangka dasar yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 - berfungsi sebagai pedoman bagi berbagai pihak, termasuk
 - penyusun laporan keuangan,
 - pemeriksa, dan
 - pengguna laporan keuangan,
 - dalam mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan).

Referensi

- DPR. 2025. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). sekretaris jenderal - dewan perwakilan rakyat DPR RI. <https://berkas.dpr.go.id>. Diakses: Jumat, 06 Juni 2025; 23.51.50
- Kamushukum. 2025. *Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan*. <https://www.kamus-hukum.com>. Diakses: Senin, 09 Juni 2025, 10.05.27
- KSAP. 2005. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. <https://ksap.org>. Diakses: Sabtu, 07 Juni 2025; 14.35.53
- KSAP. 2004. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).. <https://ksap.org>. . Diakses: Kamis, 17 April 2025, 05.41.47
- PP (Peraturan Pemerintah) 71 Tahun 2010. *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Suwardjono, 2006. *Teori akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- <https://web.iaiglobal.or.id/>
- <https://iapi.or.id/>
- <https://www.ksap.org/sap/>
- FAS . <https://www.fasb.org>
- <https://www.ifrs.org>